

**OPTIMALISASI FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM
MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG) KOTA TANJUNGPINANG**

Arthie Prisilia¹, Novi Winarti², Jefryzal³

^{1,2}Universitas Maritim Raja Ali Haji, ³Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang

¹aprisilia@student.umrah.ac.id, ²noviwinarti@umrah.ac.id,

³bappelitbang@tanjungpinangkota.go.id

ABSTRACT

The Regional Development Planning, Research and Development Agency (Bappelitbang) of Tanjungpinang City plays a strategic role in producing research findings and innovations that serve as the foundation for regional development policymaking. However, the suboptimal utilization of research and development outputs in the development planning process indicates a gap between the expected role of research and development (R&D) and its actual implementation. This study aims to analyze the implementation and optimization of the research and development function in supporting regional development planning at Bappelitbang of Tanjungpinang City. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were subsequently analyzed descriptively. The findings reveal that the R&D function at Bappelitbang of Tanjungpinang City has not been implemented optimally, as indicated by inconsistencies in the measurement of performance indicators and the failure to achieve regional innovation implementation targets. Several challenges were identified, including the limited utilization of research findings in development policies, the lack of alignment between research activities and regional strategic issues, weak motivation among civil servants and regional government agencies to innovate, and limited collaboration with higher education institutions. Using George R. Terry's POAC management framework (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling), the study proposes several recommendations, including the formulation of a research and development master plan, strengthening multi-stakeholder collaboration, enhancing innovation mentoring and training programs, and developing a results-oriented monitoring and evaluation system.

Keywords: Research and Development Function, Optimization, Regional Development Planning

ABSTRAK

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang memiliki peran strategis dalam menghasilkan kajian dan inovasi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Namun, belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi litbang yang diharapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah pada Bappelitbang Kota Tanjungpinang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi litbang di Bappelitbang Kota Tanjungpinang belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh ketidaksesuaian metode pengukuran indikator kinerja serta belum tercapainya target penerapan inovasi daerah. Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya pemanfaatan hasil kajian dalam kebijakan pembangunan, kurangnya kesesuaian penelitian dengan isu strategis daerah, lemahnya motivasi ASN dan OPD dalam berinovasi, serta terbatasnya kolaborasi dengan perguruan tinggi. Analisis menggunakan teori manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dari George R. Terry menghasilkan rekomendasi berupa penyusunan rencana induk kelitbangan, penguatan kolaborasi multipihak, peningkatan pendampingan dan pelatihan inovasi, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada hasil.

Kata Kunci: Fungsi Litbang, Optimalisasi, Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang efisien, efektif dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 dalam pasal 1 ayat 22, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan,

yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di masing-masing daerah (Kemendagri RI, 2017). Perencanaan Pembangunan ini tolak ukur dari kemajuan suatu daerah, tidak hanya berperan sebagai panduan bagi arah pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan berbagai

kepentingan masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan yang efektif dapat mendorong pemerataan, menghasilkan kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas layanan dasar (Skala, 2018).

Seiring dengan permasalahan dalam pembangunan yang semakin kompleks, perencanaan yang bersifat administratif sudah tidak mencukupi. Saat ini, perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan pada informasi dan data yang akurat serta kajian ilmiah yang menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan bahwa dokumen perencanaan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi dan kepentingan tertentu, dibandingkan dengan penerapan data dan hasil penelitian ilmiah, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan yang dihasilkan (Budi Pramono, 2024).

Pendekatan *evidence-based policy* atau pendekatan berbasis bukti menjadi sangat krusial untuk

menjamin bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pemanfaatan data, penelitian, dan analisis ilmiah dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mampu mengurangi pengaruh bias politik dan meningkatkan fokus pada kepentingan masyarakat (Rahman et al., 2023).

Dalam mendukung perencanaan yang berbasis data tersebut, fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan daerah. Peran utamanya adalah memberikan berbagai informasi dan data yang berasal dari hasil penelitian, analisis dan studi yang mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai fenomena serta isu yang dihadapi oleh pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditawarkan berbagai inovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Syahri & Supardi, 2025).

Selain itu, penelitian dan pengembangan (litbang) juga memiliki peran sebagai penghasil saran

kebijakan yang dapat menghubungkan kebutuhan nyata yang ada di lapangan dengan tahapan perencanaan pembangunan. Namun, keberhasilan penelitian dan pengembangan (litbang) sangat bergantung pada sejauh mana hasil penelitian dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Pengintegrasian ini sangat penting agar hasil penelitian tidak hanya menjadi sekedar dokumen akademik, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan dan program pembangunan.

Dalam hal ini, Bappelitbang memainkan peran krusial dalam menjembatani antara fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) dengan proses penyusunan. Namun, dalam praktiknya fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sering kali belum berjalan secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) dalam mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan daerah masih belum

tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan oleh ketersediaan sumber daya aparatur yang tidak sesuai dengan standard kompetensi yang telah ditetapkan bagi sumber daya aparatur penelitian dan pengembangan (litbang), serta kekurangan dalam komunikasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Fitrianto et al., 2024).

Selain itu, fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) di daerah belum menunjukkan kemajuan dalam penyelesaian isu-isu sehingga hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) sulit untuk diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan (Solahudin et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) secara ideal sebagai penyedia rekomendasi kebijakan dengan realitas implementasinya di lapangan. Dengan demikian perlu dilakukan pengoptimalan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) agar kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut dapat diminimalisir sehingga perencanaan untuk pembangunan daerah dapat lebih

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Kota Tanjungpinang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2023, Bappelitbang bertugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Namun, efektivitas dan optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan di Bappelitbang Kota Tanjungpinang dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi aktual dan hasil kajian penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait belum optimalnya integrasi fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) dalam

mendukung perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji bagaimana pelaksanaan dan optimalisasi fungsi litbang pada Bappelitbang Kota Tanjungpinang dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi litbang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasinya. Kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian mengenai integrasi fungsi litbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bappelitbang Kota Tanjungpinang, yang masih terbatas dibahas dalam penelitian sebelumnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena dan proses pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Metode studi kasus dipilih karena

memungkinkan peneliti mengkaji suatu fenomena secara komprehensif dalam konteks yang nyata dan spesifik.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappelitbang Kota Tanjungpinang, untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan dan optimalisasi fungsi litbang. Selain itu, observasi dilakukan selama kegiatan magang di Bappelitbang Kota Tanjungpinang untuk mengamati secara langsung aktivitas dan proses yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan serta perencanaan pembangunan daerah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti Rencana Strategis (Renstra), laporan kinerja, regulasi, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1984), yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan

penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan melalui integrasi fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2023, Bappelitbang bertugas membantu Wali Kota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan (Peraturan Wali Kota Tanjungpinang, 2023). Dalam konteks pembangunan daerah modern, fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi instrumen penting untuk menghasilkan kajian berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*) yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan fungsi litbang menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, adaptif, dan

berkelanjutan. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi tersebut telah dijalankan, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan program dan capaian kinerja penelitian dan pengembangan di Bappelitbang Kota Tanjungpinang.

Pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan di Bappelitbang Kota Tanjungpinang diwujudkan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Program Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah diarahkan untuk menghasilkan berbagai kajian yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, sedangkan Program Riset dan Inovasi Daerah difokuskan pada pengembangan dan penerapan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Keberadaan kedua program tersebut menunjukkan bahwa fungsi litbang telah menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi litbang perlu

dianalisis lebih lanjut melalui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi (Bappelitbang, 2025). Sebagai bentuk implementasi fungsi penelitian dan pengembangan, Bappelitbang Kota Tanjungpinang menetapkan indikator kinerja yang mengukur tingkat pemanfaatan hasil kajian atau riset dalam perumusan kebijakan daerah. Capaian indikator tersebut selama periode 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Capaian Indikator Persentase Hasil Kajian atau Riset yang Dijadikan Dasar Perumusan Kebijakan Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Rasio Capaian (%)
2020	60,00	66,67	111,11
2021	60,00	100,00	166,67
2022	68,57	100,00	145,83
2023	70,00	75,00	107,14
2024	77,27	100,00	129,41

Sumber: Bappelitbang Kota Tanjungpinang (2025).

Berdasarkan Tabel 1, indikator persentase hasil kajian atau riset yang dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah menunjukkan capaian yang relatif baik selama periode 2020-2024. Seluruh realisasi indikator berada di atas target yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun 2021, 2022, dan 2024 realisasi mencapai 100%. Secara administratif, capaian tersebut mengindikasikan bahwa hasil penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Bappelitbang telah

dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Temuan ini menunjukkan adanya upaya institusional untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, capaian yang tinggi tersebut perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana angka yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi pemanfaatan hasil penelitian di lapangan (Bappelitbang, 2025).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menunjukkan bahwa capaian indikator yang terlihat tinggi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Terdapat ketidaksesuaian antara metode pengukuran indikator yang digunakan dalam pelaporan kinerja dengan rumus yang seharusnya digunakan berdasarkan dokumen RPJMD. Akibatnya, capaian yang dilaporkan secara administratif berpotensi menghasilkan interpretasi yang kurang akurat mengenai tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan pembangunan daerah. Selain pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan,

keberhasilan fungsi penelitian dan pengembangan juga dapat diukur melalui tingkat penerapan inovasi daerah. Capaian indikator persentase tingkat keberhasilan penerapan inovasi daerah pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Capaian Persentase Tingkat Keberhasilan Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2024

Indikator	Persentase Tingkat Keberhasilan Penerapan Inovasi Daerah
Target (%)	56,00
Realisasi (%)	52,00
Rasio Capaian (%)	92,85

Sumber: Bappelitbang Kota Tanjungpinang (2025).

Berdasarkan Tabel 2, target tingkat keberhasilan penerapan inovasi daerah pada tahun 2024 belum tercapai. Dari target sebesar 56,00%, realisasi yang diperoleh hanya sebesar 52,00% atau mencapai 92,85% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara optimal di lingkungan pemerintah daerah. Dengan kata lain, fungsi penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya berhasil mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan dan berdampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi ini mengindikasikan adanya berbagai faktor yang menghambat optimalisasi fungsi litbang sehingga perlu dianalisis lebih mendalam untuk menemukan solusi yang tepat (Bappelitbang, 2025).

Untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan, Bappelitbang Kota Tanjungpinang telah melakukan analisis permasalahan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi litbang. Ringkasan permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Permasalahan Optimalisasi Fungsi Penelitian dan Pengembangan di Bappelitbang Kota Tanjungpinang

Pokok Masalah	Akar Masalah	Indikator Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil riset serta inovasi daerah	Belum terbangunnya ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rendahnya pemanfaatan hasil kajian dalam kebijakan; kurangnya penelitian sesuai isu strategis daerah; rendahnya motivasi ASN dan OPD dalam berinovasi; minimnya kolaborasi dengan

perguruan tinggi

Sumber: Renstra Bappelitbang Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029.
 Berdasarkan Tabel 3, permasalahan utama yang dihadapi Bappelitbang Kota Tanjungpinang adalah belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil riset serta inovasi daerah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa fungsi litbang belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya sebagai penyedia pengetahuan dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah. Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih komprehensif, setiap indikator permasalahan perlu dianalisis berdasarkan hasil penelitian dan kajian terdahulu yang relevan.

Permasalahan pertama adalah masih rendahnya pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar implementasi kebijakan daerah. Meskipun berbagai penelitian telah dilaksanakan, hasil kajian yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses produksi pengetahuan dengan pemanfaatan hasil penelitian dalam praktik kebijakan. Temuan ini

sejalan dengan penelitian Oktaviana et al. (2018) yang menyatakan bahwa lembaga penelitian dan pengembangan daerah masih menghadapi tantangan dalam memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah. Selain itu, Fitrianto, Bintoro, & Hapsari (2024) menjelaskan bahwa lemahnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga penelitian dengan pengguna hasil penelitian menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan hasil kajian dalam kebijakan publik. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penelitian perlu diiringi dengan penguatan mekanisme pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pembangunan daerah.

Permasalahan kedua adalah masih kurangnya penelitian dan kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah. Beberapa penelitian yang dilaksanakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembangunan yang sedang dihadapi oleh Kota Tanjungpinang. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa agenda penelitian pada sektor strategis belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Akibatnya, penelitian yang dihasilkan belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perencanaan penelitian yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan daerah agar hasil penelitian memiliki relevansi yang tinggi terhadap proses perencanaan pembangunan.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan rendahnya motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghasilkan inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ASN masih berorientasi pada pelaksanaan tugas administratif sehingga inovasi belum menjadi budaya kerja yang melekat dalam organisasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan penerapan inovasi daerah sebagaimana terlihat pada capaian indikator tahun 2024. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ridlowi & Himam (2018) yang menjelaskan bahwa inovasi pada organisasi sektor publik sering terhambat oleh budaya birokrasi yang kurang mendukung perubahan, minimnya insentif, dan rendahnya dukungan organisasi. Senada dengan

itu, Mozin et al. (2025) menemukan bahwa inovasi daerah akan sulit berkembang apabila aparaturnya pemerintah belum memiliki motivasi dan komitmen yang kuat untuk melakukan pembaruan dalam tata kelola pemerintahan.

Permasalahan berikutnya adalah minimnya kolaborasi antara Bappelitbang dengan perguruan tinggi. Padahal, perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik dan sumber daya penelitian yang dapat mendukung penguatan kualitas kajian dan inovasi daerah. Keterbatasan kolaborasi tersebut menyebabkan berbagai potensi sinergi dalam pengembangan penelitian dan inovasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Temuan ini mendukung penelitian Alfarisi, Alfiah & Rasaili (2025) yang menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem riset daerah yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan dapat dianalisis menggunakan teori manajemen POAC (*Planning,*

Organizing, Actuating, Controlling) yang dikemukakan oleh George R. Terry. Menurut Jeka, Samsu, & Indriyani (2024), keempat fungsi manajemen tersebut merupakan proses yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan ini, optimalisasi fungsi litbang tidak hanya difokuskan pada penyelesaian masalah yang muncul, tetapi juga pada penguatan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap aspek POAC perlu diimplementasikan secara terintegrasi untuk meningkatkan kontribusi fungsi litbang terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pada aspek *Planning*, optimalisasi diarahkan pada penyusunan Rencana Induk Kelitbang yang terstruktur dan selaras dengan isu strategis pembangunan daerah. Keberadaan dokumen tersebut akan membantu Bappelitbang dalam menentukan prioritas penelitian berdasarkan kebutuhan daerah serta memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan memiliki relevansi terhadap dokumen perencanaan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Irdon, Gevisioner, &

Erwan (2024). yang menjelaskan bahwa Rencana Induk Kelitbang berperan penting dalam meningkatkan sinkronisasi antara agenda penelitian dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, penguatan aspek perencanaan menjadi fondasi awal dalam meningkatkan kualitas fungsi litbang.

Pada aspek *Organizing*, optimalisasi dilakukan melalui penguatan struktur kolaborasi antara Bappelitbang, OPD, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut tidak hanya diperlukan pada tahap pelaksanaan penelitian, tetapi juga pada proses diseminasi, pemanfaatan, dan evaluasi hasil kajian. Selain itu, diperlukan mekanisme yang mampu memastikan bahwa rekomendasi hasil penelitian dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang berkepentingan. Dengan adanya struktur koordinasi yang lebih kuat, hasil penelitian tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi dapat dimanfaatkan secara nyata dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan organisasi menjadi faktor penting dalam menjembatani hasil penelitian dengan implementasi kebijakan.

Pada aspek *Actuating*, optimalisasi diarahkan pada peningkatan motivasi ASN dan OPD dalam menghasilkan inovasi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, pemberian penghargaan, serta penguatan budaya kerja yang mendukung inovasi. Menurut Efendi & Frinaldi (2024), keberhasilan inovasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan dukungan organisasi yang mendorong perubahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sementara itu, pada aspek *Controlling*, optimalisasi dilakukan melalui pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Sistem pengendalian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dan inovasi benar-benar dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, evaluasi terhadap metode pengukuran indikator kinerja perlu

dilakukan agar capaian yang dilaporkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Temuan Ayomi, Suradinata, & Nurdin (2023) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja organisasi publik akan meningkat apabila sistem evaluasi tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan di Bappelitbang Kota Tanjungpinang telah berjalan melalui berbagai program penelitian dan inovasi daerah, namun pelaksanaannya belum mencapai kondisi yang optimal. Berbagai kendala yang ditemukan, mulai dari ketidaksesuaian pengukuran indikator kinerja, keterbatasan anggaran, rendahnya motivasi ASN dalam berinovasi, hingga minimnya kolaborasi dengan perguruan tinggi, menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya perbaikan

yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan manajemen POAC secara terintegrasi menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat fungsi litbang sehingga mampu menghasilkan kajian dan inovasi yang lebih berkualitas, meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan publik, serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti, inovatif, dan berkelanjutan

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) di Bappelitbang Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Program Riset dan Inovasi Daerah yang bertujuan mendukung perencanaan pembangunan berbasis data dan mendorong inovasi daerah. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh ketidaksesuaian metode pengukuran indikator kinerja serta belum tercapainya target keberhasilan penerapan inovasi daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

ketidaktepatan pengukuran kinerja, keterbatasan anggaran penelitian, rendahnya motivasi ASN dan OPD dalam berinovasi, serta masih terbatasnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Berdasarkan temuan tersebut, optimalisasi fungsi litbang perlu dilakukan melalui penerapan pendekatan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) secara terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penyusunan rencana induk kelitbang yang selaras dengan isu strategis daerah, penguatan kolaborasi antara Bappelitbang, OPD, dan perguruan tinggi, peningkatan pendampingan serta pelatihan inovasi bagi ASN, dan pengembangan sistem monitoring serta evaluasi yang berorientasi pada hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi; Alfiyah, Nur Inna; Rasaili, W. (2026). *PERAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA) DALAM MENDUKUNG MINAT RISET PUBLIK DI KABUPATEN SUMENEP*. 11(01), 47–61.
- Ayomi, D., Suradinata, E., & Nurdin, I. (2023). Analisis Manajemen Kinerja Dalam Mendukung Sistem. *Management Analysis Journal*, 9(2), 27–40.
- Bappelitbang, K. T. (2025). (*Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang 2025-2029*).
- Budi Pramono, S. (2024). Single-Integrated Data/ SID Sebagai Solusi Sistem Perencanaan. *Jurnal Interaktif*, 16(2), 58–62. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2024.016.02.1>
- Efendi, T., & Frinaldi, A. (2024). Inovasi sebagai Pilar Reformasi Birokrasi: Kajian Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Organisasi Sektor Publik. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 630–639. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.271>
- Fitrianto, Y., Bintoro, R. F. A., & Hapsari, P. (2024). Optimalisasi Peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan di Daerah. *5th Seminastika*, 5(1). <https://doi.org/10.47002/seminastika.v5i1.844>
- Irdon; Gevisioner; Erwan, Edi; Romus, M. (2024). *POLICY DIRECTIONS AND STRATEGIES OF RESEARCH AND*. 4(2), 1–10.
- Jeka, Firdaus; Samsu; Indriyani, T. A. (2024). *PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM*. 11(1), 150–158.
- Kemendagri RI. (2017). Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri*

- Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.
Retrieved from
www.peraturan.go.id
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20–30.
- Mozin, Y., Pakaya, R., Sasmindar, D., Ntelu, N., Hasan, H., Patuti, V. I., ... Penelitian, A. (2025). Reformasi Birokrasi SDM Aparatur; Kinerja ASN Dalam Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Bandung). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7305–7311.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9357>
- Oktaviana, O., Bachruddin, D. T., & Fernanto, G. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Tata-Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 17–34.
<https://doi.org/10.24258/jba.v14i1.305>
- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang. (2023). *Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang*. (6), 1–23.
- Rahman, M., Muluk, K., Winoto, S., Anggoro, D. D., & Yi, K. (2023). Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 Dalam Perspektif. 174–178.
- Ridlowi, R., & Himam, F. (2018). Inovasi pada Organisasi Pemerintah: Tahapan dan Dinamika. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 2(1), 22.
<https://doi.org/10.22146/gamajop.31866>
- Skala. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kebijakan dan Pelayanan Dasar yang Inklusif*.
- Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung. *JANITRA : Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2(2), 302–308.
- Syahri; Supardi. (2025). KAPASITAS KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTA HDAERAH KABUPATEN NOGANK EMORINGULU. 5(2), 344–350.